

KINERJA BIRO UMUM DAN KEUANGAN DALAM PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DI UNIVERSITAS TADULAKO

Taswin

(Mahasiswa Program Studi Magister Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Tadulako)

Abstract

This study aims to determine the performance of General Affairs and Finance of the State Revenue Tadulako. The research method is qualitative research by selecting informants who can provide data according to the needs of research using Snowbaal. Data collection techniques in this study using the method: Observation (observation), interviews, and documentation. The results of the research showed that performance of General Affairs and Finance of the State Revenue Tadulako, has not gone well, because of the 5 indicators that were used in studying the problem of knife analysis research study found the facts that: 1) Productivity in non-tax revenue optimization can be said yet optimal due to non-tax revenue was only focused on the SPP funds. 2) The quality of service is already running optimally due to non-tax revenues was implemented by the University Tadulako with BLU system. 3) Responsiveness has not been optimal due to the asset management commitment Revenues Revenues Tadulako still weak, especially the aspect of control and monitoring of collaboration with the local government as Rusunawa Building for Students UNTAD. 4) The responsibility disebabkan not yet optimal consistency setting time of receipt of non-tax revenues such as tuition payments, which often change - change, 5) Accountability is not running optimally due to frequent delays in reporting to the Ministry of Finance due to the delay of data units and existing faculty within the University Tadulako, due to the factor of human resources and inadequate infrastructure.

Keywords: *accountability, performance, revenues, productivity, quality, responsiveness, responsibility and accountability.*

Perguruan tinggi sebagai salah satu unit satuan kerja pemerintah yang memberi pelayanan kepada masyarakat mempunyai karakteristik dan sifat yang berbeda dengan satuan kerja pemerintah pada umumnya. Sebagai satuan kerja, perguruan tinggi menerima berjenis-jenis pendapatan negara bukan pajak (PNBP) dengan jadwal penerimaan tertentu dan jumlahnya kadang-kadang tidak dapat diperkirakan. Menurut UU nomor 20 tahun 1997 tentang PNBP pasal 1, menjelaskan bahwa:, Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah seluruh penerimaan Pemerintah pusat maupun Daerah yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. PNBP diantaranya adalah sumber daya alam, bagian pemerintah atas laba BUMN, serta penerimaan negara bukan pajak lainnya.

Menurut Peraturan Pemerintah nomor 1 tahun 2004 tentang tatacara penyampaian

rencana dan laporan realisasi penerimaan negara bukan pajak pasal 1 angka 5, Rencana PNBP adalah hasil penghitungan/penetapan PNBP yang diperkirakan akan diterima dalam 1 (satu) tahun yang akan datang. Menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa kelompok PNBP, meliputi jenis- jenis penerimaan sebagai berikut: a). Penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana pemerintah, b) Penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam, c) Penerimaan dari hasil-hasil kegiatan pelayanan yang dilaksanakan pemerintah, d) Penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan pemerintah, e) Penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi, f) Penerimaan berupa hibah yang merupakan hak pemerintah, g) Penerimaan lainnya yang

diatur dalam undang - undang tersendiri. Dalam pasal 3 ayat (1) disebutkan bahwa Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak ditetapkan dengan memperhatikan dampak pengenaan terhadap masyarakat dan kegiatan usahanya, biaya penyelenggaraan kegiatan Pemerintah sehubungan dengan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersangkutan, dan aspek keadilan dalam pengenaan beban kepada masyarakat.

Dalam pengelolaan PNB di Perguruan Tinggi, pada tahun 2012 Universitas Tadulako ditetapkan sebagai Satuan Kerja (Satker) Badan Layanan Umum (BLU) melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 97/KMK.05/2012 tentang Penetapan Universitas Tadulako pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Instansi pemerintah yang menerapkan pengelolaan Keuangan BLU. Sehingga dalam proses pencairan dana setiap unit kerja mengajukan pencairan/penarikan dana ke Bagian Keuangan. Bagian Keuangan melakukan verifikasi, setelah pengajuan Surat Perintah Pencairan (SPP) lengkap, diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) dan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Prosedur permintaan pembayaran dan pencairan dana untuk setiap unit kerja dilakukan dengan proses manual, dengan mengikuti mekanisme penerimaan dan pengujian SPP yang dikeluarkan oleh PPK. Menurut Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: 02/PB/2005, prosedur pengajuan SPP dan penerbitan SPM untuk PNB adalah ; a) Dalam pencairan dana PNB Kuasa Pengguna Anggaran harus memperhatikan persentase maksimum pencairan dana sesuai dengan ketentuan yang berlaku; b) Untuk PNB perguruan tinggi maksimum pencairan sebesar seratus persen dan setoran dengan batas tertinggi sesuai pagu; c) Tata cara pencairan dan pertanggung jawaban dana PNB tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku. d) UP/TUP untuk PNB diajukan terpisah dari UP/TUP lainnya. Setelah

menerima SPP, pejabat penandatanganan SPM menerbitkan SPM.

Dari observasi awal peneliti, ditemui fakta, bahwa : Pengelolaan utamanya penerimaan PNB di Universitas Tadulako mengalami beberapa hambatan dalam pelaksanaannya, disebabkan karena berbagai keterlambatan administrasi PNB, Kualitas Layanan adalah dimana sering dana untuk kegiatan akademik sering terlambat sampai di fakultas atau unit lain yang ada di lingkungan Universitas Tadulako, kualitas layanan sering terlambat seperti data tidak tersimpan dengan baik sehingga menyulitkan dalam pelaporan, hal tersebut karena sumber daya pengelola yang mempunyai kemampuan teknis bidang keuangan masih sangat terbatas, Responsivitas seperti pelayanan cepat tidak ditemui. Hambatan berikutnya belum ada standar baku untuk Perguruan Tinggi Negeri, terutama juknis pengelolaan dana PNB di Universitas Tadulako.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis tertarik melakukan kajian dalam bentuk tesis, dengan judul “ Kinerja Biro Umum dan Keuangan Dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak di Universitas Tadulako

METODE

Penelitian ini adalah penelitian Kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Metode penelitian kualitatif untuk memuat gambaran mengenai situasi atau kejadian, sehingga metode ini berkehendak mengadakan akumulasi data dasar belaka. Peneliti memberikan gambaran terhadap fenomena-fenomena,serta membuat prediksi serta mendapatkan makna dan implikasi dari suatu masalah yang ingin dipecahkan.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah pada Biro Umum dan Keuangan Universitas Tadulako, dengan pertimbangan Biro Umum dan Keuangan Universitas Tadulako merupakan pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak, serta Universitas Tadulako sebagai Perguruan

Tinggi Negeri terbesar di Propinsi Sulawesi Tengah yang memiliki mahasiswa terbanyak di Sulawesi Tengah.

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari Informan dengan cara wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara dan Data sekunder adalah data yang berguna bagi peneliti karena data ini diperoleh dari dokumen-dokumen yang berisi informasi yang berkaitan dengan data yang diperoleh di lapangan.

Informan

Informan yang terpilih merupakan orang yang akan dijadikan sumber informasi dilapangan yang berkaitan dengan data temuan yang relevan dengan penelitian ini. Teknik informan berdasarkan, *purposive* (penunjukan berdasarkan kapasitas yang dimiliki informan tersebut). Informan yang terpilih sebanyak 7 orang (Pengelola PNBP pada Biro Umum dan Keuangan Universitas Tadulako) dengan uraian sebagai berikut: Kepala Biro Akademik dan Perencanaan, Kepala Biro Umum dan Keuangan, Kepala Bagian Keuangan, Kasubag. Perbendaharaan PNBP Bendahara Penerimaan, Kepala Sub. Bagian Keuangan dan Kepegawaian, Fakultas Pertanian dan Penerima Dana PNBP.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik dalam pengumpulan data adalah: 1) *Observasi* adalah Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan mengenai objek dan subjek yang akan diteliti (Nasir, 1999: 212). Tehnik ini digunakan untuk mengamati secara langsung Kinerja Biro Umum dan Keuangan Universitas Tadulako Dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak. 2) *Wawancara* adalah mewawancarai langsung informan secara mendalam. 3) *Dokumen* adalah suatu teknik pengumpulan data dengan cara menghimpun segala macam data yang

berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dengan mempelajari dan menelaah arsip-arsip ataupun dokumen-dokumen serta melampirkan data visual atau foto-foto kegiatan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dimana data yang ditemui dilapangan diproses secara sederhana ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan”. Data dari penelitian ini setelah ditentukan kriteria berdasarkan data yang terkumpul, maka langkah berikutnya dibuat analisis atau penyederhanaan data melalui interpretasi secara tertulis dengan pendekatan analisis kualitatif

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mengkaji Kinerja Biro Umum dan Keuangan Dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak di Universitas Tadulako, digunakan teori kinerja organisasi yang bersumber dari Dwiyanto (2008: 50), mengemukakan ukuran kinerja birokrasi publik dengan 5 aspek, yaitu: 1) Produktifitas. Produktifitas pada umumnya dipahami sebagai rasio antara input dan output, 2) Kualitas layanan. Mengukur sejauhmana kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, 3) Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, 4) Responsibilitas, yaitu menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi baik yang eksplisit maupun implicit dan 5) Akuntabilitas, yaitu menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan

kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa: Kinerja Biro Umum dan Keuangan Dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak di Universitas Tadulako “ belum berjalan optimal, disebabkan dari 5 indikator yang dijadikan pisau analisis dalam mengkaji permasalahan penelitian ditemui fakta penelitian bahwa: 1) Produktivitas dalam optimalisasi penerimaan PNBP dapat dikatakan belum optimal disebabkan karena penerimaan PNBP hanya difokuskan pada dana SPP. 2) Kualitas Layanan sudah berjalan optimal karena PNBP sudah dilaksanakan oleh Universitas Tadulako dengan sistem BLU. 3) Responsivitas belum berjalan optimal disebabkan komitmen pengelola PNBP terhadap asset PNBP Universitas Tadulako masih lemah terutama aspek kontrol dan pengawasan terhadap hasil kerjasama dengan Pemda setempat seperti Bangunan Rusunawa untuk Mahasiswa Untad. 4) Responsibilitas belum optimal disebabkan tidak konsistensi penetapan penerimaan PNBP seperti waktu pembayaran SPP yang sering berubah-ubah , 5) Akuntabilitas belum berjalan dengan optimal disebabkan sering terjadi keterlambatan pelaporan ke Departemen Keuangan karena keterlambatan data dari unit-unit serta Fakultas yang ada dalam lingkungan Universitas Tadulako, disebabkan faktor sumber daya manusia dan sarana prasarana yang belum memadai. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa “ Kinerja Biro Umum dan Keuangan Dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak di Universitas Tadulako Belum Optimal“.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, maka dapat disimpulkan bahwa” Kinerja Biro Umum dan Keuangan Dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak di Universitas Tadulako “ belum berjalan

optimal, disebabkan dari 5 indikator yang dijadikan pisau analisis dalam mengkaji permasalahan penelitian ditemui fakta bahwa ada 4 indikator yang belum berjalan optimal , yaitu: 1) Produktivitas dalam optimalisasi penerimaan PNBP dapat dikatakan belum optimal disebabkan karena penerimaan PNBP hanya difokuskan pada dana SPP. 2) Responsivitas belum berjalan optimal disebabkan komitmen pengelola PNBP terhadap asset PNBP Universitas Tadulako masih lemah terutama aspek kontrol dan pengawasan terhadap hasil kerjasama dengan Pemda setempat seperti Bangunan Rusunawa untuk Mahasiswa Untad. 3) Responsibilitas belum optimal disebabkan tidak konsistensi penetapan penerimaan PNBP seperti waktu pembayaran SPP yang sering berubah-ubah , 4) Akuntabilitas belum berjalan dengan optimal disebabkan sering terjadi keterlambatan pelaporan dari unit-unit kerja ke Bagian Akuntansi dan Pelaporan pada Pada Biro Umum Dan Keuangan Universitas Tadulako, disebabkan karena sumber daya manusia dan sarana prasarana belum memadai disertai SOP dalam pengelolaan PNBP belum ada.

Rekomendasi

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka ada beberapa saran yang dianggap penting :

Rekomendasi Akademik

- 1 Untuk mengoptimalkan Kinerja Biro Umum dan Keuangan Dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak di Universitas Tadulako, perlu memperhatikan aspek Produktivitas, Kualitas Layanan, Responsivitas, Responsibilitas dan Akuntabilitas.
- 2 Perlu dilakukan penelitian yang mengkaji dan membuktikan apakah Produktivitas, Kualitas Layanan, Responsivitas, Responsibilitas dan Akuntabilitas ada hubungannya dengan Kinerja Organisasi.

Rekomendasi Praktis

1. Menganggarkan dana sosialisasi dan alokasi dana pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan kemampuan dan skill pengelola PNBPN berbasis BLU.
2. Meningkatkan kemampuan tenaga pengelola PNBPN berbasis BLU melalui pendidikan dan pelatihan, baik secara formal maupun informal
3. Penambahan sarana prasarana yang dapat mendukung pelaksanaan pengelola PNBPN berbasis BLU melalui penguatan jaringan komunikasi dan informasi.
4. Membuat Keputusan Rektor dan SOP tentang pengelolaan dana PNBPN, terutama penerimaan sumber-sumber dan kerjasama dengan mitra kerja agar pengelolaan PNBPN di Universitas Tadulako, seragam dalam inventarisasi, pembukuan dan pelaporan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Atas bantuan dari berbagai pihak, terutama kepada ibu Dr. Hj. Mustainah . M. M.Si dan Bapak Dr. Nawawi Natsir, M.Si Penulis mengucapkan banyak terima kasih atas bimbingannya selama ini, yang telah banyak memberikan bantuan pada penelitian ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Dwiyanto, Agus, 1995. *Penilaian Kinerja Organisasi Publik*, Fisipol Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Dwiyanto Agus, Partini, Ratminto & Wicaksono B, 2005, *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*, Galang Printika, Yogyakarta.
- Dwiyanto, Agus, 2008. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1995 *tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah Kepada Masyarakat*.
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) Nomor 81 Tahun 1993 *tentang Perilaku Birokrasi dalam Pelayanan Publik*.
- Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 97/KMK.05/2012, *tentang Penetapan Universitas Tadulako pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan BLU*.
- Pamudji, S, 1994, *Profesionalisme Aparatur Negara dalam Meningkatkan Pelayanan Publik*, dalam Jurnal Widya Praja, Nomor 19, IIP, Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004, *tentang Tatacara Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 *tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum*
- Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 *tentang Perubahan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum*
- Prawirosentono, Suyadi, 1999, *Kebijakan kinerja Karyawan, Kiat Membangun Organisasi Kompetitif Menjelang Perdagangan Bebas Dunia*, BPFE, Yogyakarta.
- Rao, T. V. And Pareek, 1978, *Performance Appraisal and Review Manuals*, New Delhi, Learning System.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 *tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)*.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 *tentang Keuangan Negara*
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 *tentang Perbendaharaan Negara*
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 *tentang Pelayanan Publik*.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 *tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas)*.